

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian lalu lintas atau Satlantas juga diperlukan untuk menjamin dipatuhinya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai penegak hukum Kepolisian memiliki wewenang untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi dan memberikan sanksi sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Bagi sipelanggar akan ditindak secara tegas tanpa terkecuali untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat sehingga masyarakat khususnya remaja sebagai sopir angkot akan mematuhi aturan dan tidak akan mengendarai angkot lagi. Maka dari peran Satlantas melakukan beberapa upaya-upaya seperti penanggulangan secara preventif dan penanggulangan secara represif. Ini terlihat dari peran Kepolisian lalu lintas Kota Padang dalam hal mengurangi angka kejahatan dan pelanggaran terutama remaja yang mengendarai angkot tersebut sangat serius dan dalam pelaksanaannya dapat disimpulkan dari tahun 2014 kepolisian lalu lintas dapat menyelesaikan kasus pelanggaran sebanyak 322 kasus dan pada tahun 2015 sebanyak 206 kasus. Ini menunjukkan angka kasus pelanggaran yang dilakukan sopir angkot mengalami penurunan yang signifikan, karena

Kepolisian lalu lintas Kota Padang telah melaksanakan apa yang diatur oleh undang-undang serta peraturan lainnya yang berlaku dengan baik dan secara tegas.

2. Dalam penanggulangan sopir angkot remaja Kepolisian lalu lintas Kota Padang tidak selamanya dapat berjalan dengan baik, beberapa faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam penanggulangan pelanggaran sopir angkot remaja di Kota Padang, pada umumnya pihak Kepolisian Lalu lintas mengalami beberapa kendala tidak tersedianya sarana atau kurangnya anggota yang bertugas, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam pencegahan sopir angkot yang dikemudikan remaja, tidak jerahya remaja atau anak dibawah umur sebagai sopir angkot dan kurangnya perhatian orang tua atas perilaku anak-anaknya.
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian lalu lintas Kota Padang dalam penanggulangan pelanggaran remaja sebagai sopir angkot seperti melakukan razia, tilang bahkan penyitaan terhadap angkot yang dikemudikannya, memberikan amanah kepada pengusaha angkot agar tidak mempekerjakan remaja sebagai sopir angkot serta memberikan amanah kepada sopir utama agar tidak sembarangan mencari sopir serap atau sopir pengganti. Disini Satlantas tidak akan memberikan keringanan lagi apabila ditemukan seorang remaja yang mengemudikan angkot tanpa mempunyai Surat Izin Mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan angkot yang dikendarainya.

Peran kepolisian lalu lintas Padang dalam upaya menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh sopir angkot remaja sudah cukup baik meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala-kendala sehingga upaya penanggulangan masih perlu ditingkatkan lagi agar ketentraman dan keyamanan masyarakat maupun penumpang yang ada di dalam angkot dapat diwujudkan serta berupaya untuk menurunkan angka pelanggaran terhadap sopir angkot dan remaja yang mengemudikan angkot yang terjadi di wilayah hukum Polresta Padang.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap peran Satlantas dalam penegakan hukum terhadap sopir angkot remaja di kota Padang dan memperhatikan data-data yang penulis peroleh maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai bahan evaluasi, yaitu:

1. Perlu meningkatkan kualitas dan profesionalisme dari petugas dalam melaksanakan peran Satlantas dalam penegakan hukum terhadap sopir angkot maupun remaja yang mengemudikan angkot dan perlu juga ditingkatkan kesejahteraan pihak Kepolisian khususnya Satlantas agar tidak terjadi kejenuhan sehingga dapat meningkatkan kinerja Kepolisian lalu lintas Kota Padang.
2. Perlunya proses interaksi yang lebih luas dan memberikan penyuluhan kepada orang tua anak yang kedapatan melakukan pelanggaran dalam mengemudikan angkot dan masyarakat terutama penumpang yang menaiki angkot agar lebih

memahami arti pentingnya yang timbul dari bahaya apabila seorang remaja yang mengendarai angkot tanpa mempunyai SIM dan STNK serta tanpa keahlian dalam membawa angkot.

3. Adanya tindakan dan upaya hukum yang tegas bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya yang membahayakan dirinya sendiri maupun penumpang yang dia bawa tersebut.
4. Perlunya peningkatan koordinasi antara instansi terkait agar terjadi hubungan yang harmonis dan kooperatif sehingga mempermudah proses untuk menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh sopir angkot terutama remaja yang menjadi sopir angkot di Kota Padang.
5. Perlunya peningkatan kerjasama instansi antara Kepolisian khususnya Satlantas dengan Dinas Perhubungan Kota Padang agar mempermudah untuk menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh setiap angkot sebab angkot di Kota Padang sangat banyak jumlahnya.

